

## PERAN DP3AP2KB DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN KELUARGA MISKIN DI KOTA TANGERANG

Ade Musyanti<sup>1</sup>, Dafyar Eliadi Hardian<sup>2</sup>, Edi Mulyadi<sup>3</sup>

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

*Email:* <sup>1</sup> ademusyanti385@gmail.com

*Email:* <sup>2</sup> dafyar711@unis.ac.id

*Email:* <sup>3</sup> emulyadi@unis.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pemberdayaan Perempuan untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Keluarga Miskin di Kota Tangerang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan perempuan yang mempunyai posisi strategis dalam pembangunan di daerah, oleh karena itu keberadaannya perlu diberdayakan agar bisa memberikan kontribusi secara positif terhadap pembangunan. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan yaitu melalui program peningkatan kualitas hidup perempuan bagi perempuan keluarga miskin yang menjadi peserta program keluarga harapan. Dalam menganalisis pemberdayaan perempuan pada penelitian ini menggunakan konsep teori pemberdayaan dari Nugroho, dimana pemberdayaan perempuan diukur dengan menggunakan indikator akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Analisis data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan kepada informan penelitian yang diambil secara sengaja, sedangkan teknik observasi dilakukan terhadap pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan bagi perempuan keluarga miskin. Hasil penelitian memberikan sebuah informasi perempuan keluarga miskin di Kota Tangerang sudah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan program pemberdayaan perempuan dimana setiap perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelatihan agar memiliki keterampilan, rasa percaya diri dalam mengambil keputusan agar memberikan perubahan dalam kehidupan setiap perempuan. Walaupun akses yang diberikan kepada perempuan keluarga miskin belum diberikan secara merata karena belum semua perempuan keluarga miskin yang terdaftar dalam peserta Program Keluarga Harapan mendapatkan pelatihan pengolahan pangan sebagai implementasi dari program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Dalam upaya mengoptimalkan akses untuk memperoleh sumber daya produktif perempuan keluarga miskin melalui program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan disarankan agar lebih meningkatkan komunikasi terhadap jejaringnya terkait dengan sosialisasi program pemberdayaan perempuan agar setiap perempuan keluarga miskin yang terdaftar pada peserta Program Keluarga Harapan dapat memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan pada program.

**Kata kunci :** Pemberdayaan perempuan, perempuan keluarga miskin, peningkatan kualitas hidup perempuan.

## **Abstract**

*This study aims to analyze the Role of the Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning Service in Empowering Women to Improve the Quality of Life of Poor Women in Tangerang City. This study is motivated by the existence of women who have a strategic position in regional development, therefore their existence needs to be empowered so that they can contribute positively to development. Women's empowerment is carried out through a program to improve the quality of life of women for poor women who are participants in the family hope program. In analyzing women's empowerment in this study, the concept of empowerment theory from Nugroho was used, where women's empowerment is measured using indicators of access, participation, control and benefits. Qualitative research methods are used to answer the research problems that have been formulated. Data analysis uses observation, interview and documentation techniques. Interview techniques are carried out with research informants who are taken intentionally, while observation techniques are carried out on the implementation of programs to improve the quality of life of women for poor women. The results of the study provide information that poor women in Tangerang City already have the same rights to get women's empowerment programs where every woman has the same right to get training in order to have skills, self-confidence in making decisions in order to make changes in the lives of every woman. Although access given to poor women has not been given evenly because not all poor women registered as participants in the Family Hope Program have received food processing training as an implementation of the Women's Quality of Life Improvement program. In an effort to optimize access to obtain productive resources for poor women through the Women's Quality of Life Improvement program, it is recommended to improve communication with their networks related to the socialization of women's empowerment programs so that every poor woman registered as a participant in the Family Hope Program can obtain information related to the implementation of training carried out in the program.*

**Keywords:** *Women's empowerment, women from poor families, improving women's quality of life.*

## **A. Pendahuluan**

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat krusial dihadapi oleh setiap negara, karena permasalahan kemiskinan selalu menyertai proses pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing negara termasuk di Indonesia, kemiskinan masih menjadi persoalan yang sangat besar sehingga harus diselesaikan. Permasalahan kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu wilayah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.

Kondisi ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan program pengentasan kemiskinan. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang mengembangkan pemberdayaan masyarakat hampir dipastikan lebih mengedepankan kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan. Kesempatan yang timpang ini menyebabkan banyak perempuan tidak memiliki akses untuk lebih berdaya dan memiliki kemandirian. Selain itu banyaknya realita yang berkembang di masyarakat dimana adanya sikap dan tindakan diskriminatif terhadap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga mengakibatkan kaum perempuan harus mengalami hambatan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan bahkan terancam kehidupannya.

Dalam rangka mengatasi kondisi tersebut diatas pemerintah terus berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan ini yaitu melalui pembangunan nasional bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional tersebut merupakan serangkaian proses perubahan yang dilakukan pemerintah bersama seluruh warga atau masyarakat dengan mengharapkan terwujudnya masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik. Sesuai dengan hakekat tujuan dari penyelenggaraan pembangunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Pembangunan nasional mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi, baik laki-laki maupun perempuan sehingga tidak ada lagi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan memiliki peran sebagai mitra sejajar dengan pria perlu ditingkatkan agar mampu memberikan sumbangan yang besar dalam berbagai bidang pembangunan di daerah, sehingga salah satu cara pemerintah untuk mensejajarkan peran perempuan dengan laki-laki yaitu dengan melakukan pemberdayaan terhadap perempuan.

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Suharto, 2018). Sedangkan pemberdayaan perempuan merupakan upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri (Novian, 2017).

Secara Etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang artinya kekuatan atau keberdayaan. Pemberdayaan menurut arti bahasa merupakan proses, cara, perbuatan membuat keadaan yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya dengan adanya pemberdayaan (Suharto, 2018:57).

Pemberdayaan keluarga dapat dipandang sebagai suatu proses memandirikan klien dalam mengontrol status kesehatannya. Pengertian lain tentang pemberdayaan adalah memampukan orang lain melalui proses transfer termasuk didalamnya transfer kekuatan/power, otoritas, pilihan dan perijinan sehingga mampu menentukan pilihan dan membuat keputusan dalam mengontrol hidupnya. Pemberdayaan keluarga memiliki makna bagaimana keluarga memampukan dirinya sendiri dengan difasilitasi orang lain untuk meningkatkan atau mengontrol status kesehatan keluarga (Sulisnadewi NLK, Nurhaeni, N Gayatri, 2018).

Instruksi Persiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional, bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Gill dan Feinstein dalam (Rachmawati, 2017) mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu tentang posisinya dalam kehidupan, dalam hubungannya dengan sistem budaya dan nilai setempat dan berhubungan dengan cita-cita, pengharapan, dan pandangan-pandangannya, yang merupakan pengukuran multidimensi, tidak terbatas hanya pada efek fisik maupun pengobatan psikologis.

Selain untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan secara kelembagaan, pemerintah juga mengeluarkan program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera yang merupakan program untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam rangka pembangunan masyarakat desa/kelurahan, dengan perempuan sebagai penggerak.

Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah untuk memperkuat keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Revitaliasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan ini dengan tujuan bahwa dirasa perlu adanya peningkatan peranan wanita di daerah dilaksanakan dengan terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mempunyai program kegiatan yang telah dibuat dalam rencana strategis Tahun 2019-2023 untuk menurunkan perempuan keluarga miskin melalui program pemberdayaan perempuan, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan. Program tersebut dijalankan dengan harapan dapat membantu menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan kualitas hidup perempuan keluarga miskin di Kota Tangerang.

Dengan adanya program pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan keluarga miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam lagi untuk menganalisis keberhasilan program tersebut dilaksanakan.

Dengan permasalahan tersebut, peneliti merumuskan masalahnya adalah Bagaimana program pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan keluarga miskin oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang?

## **B. Metode**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Creswell, 2017:68). Sedangkan penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017:6).

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan realitas mengenai peran dari Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang, sehingga metode penelitian didalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin di Kota Tangerang dilakukan melalui:

### **1. Akses Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin**

Pemerintah Kota Tangerang terkait dengan pemberdayaan perempuan dalam perencanaan daerahnya memfokuskan bagaimana membuat suatu program untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya yaitu dengan memberdayakan keberadaan kaum perempuan yang termasuk dalam kategori miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang sampai tahun ini diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang, akan tetap untuk program pemberdayaan kepada perempuan keluarga miskinnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang menjadi leading sektor untuk menyelenggarakannya program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam program tersebut setiap perempuan keluarga miskin yang terdaftar dalam program PKH mempunyai hak yang sama menjadi peserta PKHP.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan Dinas Sosial Kota Tangerang memfasilitasi data terkait dengan keluarga miskin pada program PKH program tersebut sebagai bagian pemberdayaan kepada keluarga miskin, kemudian selanjutnya untuk pelaksanaan pemberdayaannya kewenangannya ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang, artinya dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan perempuan kami berkolaborasi dengan DP3AP2KB, dan semua keluarga miskin sudah menerima kesempatan dalam program pemberdayaan perempuan karena pesertanya dari PKH.

Hak perempuan keluarga miskin justru mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan kaum laki-lakinya, ini dibuktikan dengan peserta yang dilibatkan

dalam PKHP 100% perempuan sehingga aksesnya atau kesempatannya lebih banyak kepada kaum perempuan karena kita meyakini kaum perempuan itu adalah motor penggerak baik dalam keluarga maupun pembangunan.

Akses perempuan khususnya perempuan keluarga miskin sudah menerima kesamaan dalam mengikuti program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) untuk pemberdayaan perempuan di Kota Tangerang, tidak dibeda-bedakan karena kita juga di Kota Tangerang sudah mempunyai aturan terkait dengan Gender, dan khususnya untuk perempuan keluarga miskin kita juga sudah berjalan terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang terintegrasi dengan program program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) dalam pemberdayaan perempuan.

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) kepada perempuan keluarga miskin yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) perlu dioptimalkan oleh peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang khususnya Bidang Pemberdayaan Perempuan salah satunya perempuan keluarga miskin perlu diberikan akses secara merata dalam memperoleh sumber daya produktif dari hasil pelatihan pada program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), yang dimaksud dengan sumber daya produktif yaitu keterampilan, modal dan kesempatan berwirausaha. Jadi peran komunikasi Pemerintah Daerah dalam akses pemberdayaan perempuan keluarga miskin sangat penting, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dafyar Eliadi dalam Jurnal Ilmiah Mukadimah Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021 mengatakan bahwa Komunikasi pemerintah memainkan peran penting dalam implementasi suatu kebijakan, komunikasi ini dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat atau antar Lembaga pemerintahan. Komunikasi pemerintah menuntut setiap perubahan yang mempengaruhi tatanan masyarakat dikomunikasikan secara efektif kepada setiap yang berkepentingan, baik kepada kalangan pemerintahan, pihak-pihak swasta, maupun masyarakat luas secara berkelanjutan.

### **3. Partisipasi Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin di Kota Tangerang**

DP3AP2KB Kota Tangerang sudah memiliki kegiatan pemberdayaan kepada perempuan seperti Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) melibatkan seluruh perempuan terutama perempuan pada keluarga miskin di setiap kelurahan yang ada di Kota Tangerang diajak bersama-sama dalam partisipasi membangun Kota Tangerang, karena program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) menjadi salah satu dalam program rencana strategis dalam pembangunan daerah Kota Tangerang.

Mereka sangat berpartisipasi bahkan aktif karena itu menyangkut juga dengan kebutuhan hidup mereka, jadi kalo mereka tidak ikut berpartisipasi itu akan merugikan mereka sendiri. Kalo mereka tidak mempunyai akses atau mereka tidak mempunyai kemauan untuk berpartisipasi mereka akan tertinggal sendiri sehingga mau tidak mau mereka harus bisa ikut berpartisipasi dalam program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) melalui pelatihan yang diberikan kepada perempuan keluarga miskin.

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), DP3AP2KB yang berkolaborasi dengan Dinas Sosial sudah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan pemberdayaan bagi perempuan keluarga miskin yang terdaftar sebagai peserta PKH, karena dalam program ini bukan hanya sebatas pada pelatihan tapi program ini ditujukan untuk pencapaian penurunan perempuan keluarga miskin, peserta pelatihan didampingi untuk diberikan permodalan agar para peserta kedepannya menjadi lebih

#### **4. Kontrol Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin di Kota Tangerang**

Pengawasan terhadap program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) DP3AP2KB tidak membedakan kaum perempuan dan laki-laki semuanya mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengawasi, yang penting tujuan kontrol yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan keluarga miskin. Kontrol Pemerintah Daerah Kota Tangerang terhadap Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin sangat penting, sesuai pendapat Dafyar Eliadi dalam Jurnal Ilmiah Mukadimah Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021 mengatakan bahwa Kontrol oleh pemerintah dalam suatu implementasi kebijakan memainkan peran penting agar suatu kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai sasarannya. Jadi kontrol Pemberdayaan perempuan keluarga miskin di kota Tangerang harus diperhatikan secara serius agar pelaksanaan pembinaannya berjalan baik sesuai yang diharapkan.

#### **5. Manfaat Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin di Kota Tangerang**

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) dalam perencanaannya diselenggarakan tiap tahun di Kota Tangerang sebagai upaya penurunan keluarga miskin, dimana lokasinya disetiap kelurahan, artinya program ini disamaratakan disetiap kelurahan agar semua masyarakat merasakan manfaat yang sama dari program ini untuk pembangunan sumber daya produktif.

Peserta dalam kegiatan pelatihan pada program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) dapat memanfaatkan kegiatannya, akan tetapi belum secara optimal menjangkau semua perempuan miskin di Kota Tangerang, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, keterbatasan komunikasi dan keterbatasan lainnya, bagi peserta yang telah mengikuti program ini Sebagian sudah bisa memanfaatkan dengan baik, akan tetapi pemanfaatan hasil pemberdayaan ini dipengaruhi oleh perspektif para peserta masing-masing, karena kemampuan peserta dalam menyerap pengetahuan didalam pelatihan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.

Setiap perempuan keluarga miskin yang telah menjadi peserta pelatihan pada program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) diharapkan sudah bisa menikmati hasil pemberdayaan perempuan yang diprogramkan walaupun pelaksanaan program pemberdayaan masih belum optimal dilaksanakan karena masih banyak kaum perempuan keluarga miskin yang terbatas informasinya mengenai program pemberdayaan kepada mereka. Ini menjadi tugas kita untuk lebih menginformasikan program pemberdayaan yang telah diprogramkan oleh DP3AP2KB.

DP3AP2KB Kota Tangerang sudah memberikan akses kepada perempuan keluarga miskin untuk memperoleh sumber daya produktifnya melalui kegiatan pelatihan, hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novi Widiastuti, P. K.

(2017) 'Penerapan Model Kelompok Usaha Kreatif Islam (KUKIS) Dalam Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pondok Pesantren.

#### **D. Kesimpulan**

1. Perempuan keluarga miskin di Kota Tangerang sudah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan program pemberdayaan perempuan dimana rasa percaya diri dalam mengambil keputusan guna memberikan perubahan dalam kehidupan setiap perempuan. Walaupun akses yang diberikan kepada perempuan keluarga miskin belum diberikan secara merata karena belum semua perempuan keluarga miskin yang terdaftar dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH) mendapatkan pelatihan pengolahan pangan sebagai implementasi dari program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP).
2. Partisipasi perempuan keluarga miskin yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) yang diselenggarakan oleh DP3AP2KB Kota Tangerang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan keluarga miskin dalam memperoleh sumber daya produktif dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Sehingga keterlibatannya dalam program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan karena berkaitan dengan kepentingan individu perempuan keluarga miskin untuk bisa berdayaguna secara mandiri.
3. Kontrol yang dilakukan bukan mencari celah kesalahan dalam pelaksanaan program akan tetapi bersama-sama mengawal program Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) yang diselenggarakan oleh DP3AP2KB Kota Tangerang agar sesuai dengan tujuannya yaitu telah direncanakan pada Peraturan Walikota Tangerang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu untuk menurunkan keluarga miskin.
4. Manfaat dari pemberdayaan perempuan melalui program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) belum dirasakan semua oleh peserta latihan, dikarenakan program ini belum menjangkau seluruh lapisan perempuan keluarga miskin yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) diselenggarakan DP3AP2KB Kota Tangerang.

#### **Referensi**

##### **Buku**

- Creswell, J. W. (2017). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed: Edisi Keempat*.
- Fathurrohman, M. & S. (2018). *Belajar & Pembelajaran Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36*. Bandung: Remaja Rosdakarya.



- Mulyawan, R. (2016). *Masyarakat Wilayah dan Pembangunan*. Bandung: UNPAD: Press.
- Novian, B. (2017). *Sekilas Tentang Pemberdayaan Perempuan*. Bangka Belitung: Sanggar Kegiatan Belajar.
- Nugroho, R. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: Rajawali Pers.
- Sirajun (2012). *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press.
- Soebiato, T. M. dan P. (2017). *Empowering People (Pemberdayaan Sumberdaya Manusia)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soetomo. (2017a). *Masalah Sosial dan Upaya Penanganannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. (2017b). *Masalah Sosial dan Upaya Penanganannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2018). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sunarti. (2017). *Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan*. Bogor: LPPM IPB.
- Totok Mardikanto, P. S. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

## **Jurnal**

- A. Suhardi. (2017). Pemberdayaan Perempuan Marginal Melalui Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan (PKHP). *An-Nisa STAIN Watampone*, 10(1), 1–6.
- Afwanda Mayako, P., Rusli, Z. and Adiarto. (2020). Pemberdayaan Perempuan Melalui Implementasi Strategi Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Di Provinsi Riau. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 1(2), 64–75. doi: 10.46730/japs.v1i2.18.
- Danial, A. et al. (2020). Pemberdayaan Melalui Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan (Pkhp) Di Pkbn Bumi Nurani Camp Ciamis. *Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 5(1), 21–29.
- Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi KPP Dan PA. (2017). *Perempuan Dan Industri Rumahan Pengembangan Industri Rumahan Dalam Sistem Ekonomi Rumah Tangga Untuk Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak*. Jakarta: KPP dan PA.
- Dwi Pratiwi K, Bambang Supriyono, I. H. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). *Jurnal Administrasi Public (JAP)*, 1(4), 502.
- El-bagiz, S. syahirah, Karimulloh, K. and Kinanthi, M. R. (2021). The Role of Family Function in the Quality of Life Related to Health in Poor Adolescents According to an Islamic Perspective: Peran Keberfungsian Keluarga Terhadap Kualitas Hidup Terkait Kesehatan Pada Remaja Miskin Menurut Perspektif Islam. *Proceeding of Inter-Islamic University Conference on Psychology*, 1 No 1(1), 8.
- Eliadi, Dafyar. (2021). Implementasi Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (PRSS) Di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 5 (2), 187-188.
- Erialdy, E. (2024). Employee performance appraisal using individual performance management. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(1), 361-367.

- Hamzah, N. (2019). Pemberdayaan Perempuan Miskin Pesisir Melalui Penguatan Industri Kecil Rumah Tangga (Study pada Perempuan sebagai Kepala Keluarga di Desa Mendalok Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat). *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(2), 50. doi: 10.24235/equalita.v1i2.5463.
- Jannah, Hasanatul. (2017). Pemberdayaan Perempuan Dalam Spriritualitas Islam (Suatu Upaya Menjadikan Perempuan Produktif. *Jurnal KARSA*, 19(2), 139.
- Kurniawan, R. A. (2018). Pengaruh Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota Surabaya Tahun 2007-2016. *Jurnal Pemerintahan*, 6(2).
- Lestari, A. Y., Humaedi, S. and Rusyidi, B. (2019). Partisipasi Perempuan Dalam Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2Wkss) Di Rw 12 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. *Share : Social Work Journal*, 9(1), 49. doi: 10.24198/share.v9i1.20689.
- Mardhatillah, Muntaha. (2021). Efektivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *JESS (Journal of Education on Social Scinece*, 5(1), 36-50.
- Muhyiddin Robani, M. and Ekawaty, M. (2019). Analisis Dampak Pemberdayaan Perempuan terhadap Kesejahteraan Keluarga. *Al-Muzara'ah*, 7(1), 1-18. doi: 10.29244/jam.7.1.1-18.
- Noer, K. U. (2021). Empowerment of women as head of poor family through the P2WKSS program in Bekasi City. *Community Empowerment*, 6(5), 864-876. doi: 10.31603/ce.4553.
- Novi Widiastuti, P. K. (2017). Penerapan Model Kelompok Usaha Kreatif Islam (KUKIS) Dalam Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pondok Pesantren. *Jurnal Empowerment*, 6(2), 23.
- Nur Ardliyana Trisnawati, O. J. (2017). Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 5(3), 489.
- Oktaviani, R. (2019). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Usaha Bersama ( Kube ) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Woman Empowering Trought Buisness Together To Increase Family Social Welfare in Donomulyo Village, Nanggulan Kulon. *Pendidikan Luar Sekolah*, 8(c), 89-100.
- Pamuji, Imanuel Agung. (2019). Pemberdayaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri Di Desa Rantau Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser. *Ejurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 8.
- Pratama, C. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan Desa Joho Dilereng Gunung Wilis. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Public*, 1(1), 14.
- Prayitno, U. S. (2017). Diferensiasi peran anggota keluarga miskin perkotaan: perspektif modal sosial. *Aspirasi*, 4(1), 15-28.
- Rachmawati, S. (2017). Kualitas Hidup Orang dengan HIV/AIDS yang Mengikuti Terapi Antiretrovial. *Jurnal Sains dan Praktik Psikologi*, 1(1), 48-62.
- Riyanta, S. and Kurniati, P. N. (2019). Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Analis*

- Kebijakan*, 2(2). doi: 10.37145/jak.v2i2.35.
- Sulisnadewi NLK, Nurhaeni, N Gayatri, D. (2018). Pendidikan Kesehatan Keluarga Efektif Meningkatkan Kemampuan Ibu Dalam Merawat Anak Diare. *Keperawatan Indonesia*, 15(3), 165-170.
- Tammu, A. B. dan R. G. (2021). Pemberdayaan Perempuan melalui Program Keluarga Harapan di Lembang Kole Barebatu Kabupaten Tana Toraja. *Journal I La galigo: Public Administration Journal*, 4(2 Oktober), 16-20.
- Tjiptaningsih, Wahyu. (2017). Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Perempuan di Desa Sindangkempeng Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon). *Reformasi : Jurnal Ilmiah Administrasi*, 1(2), 28-35.
- Wulandari, N., Indrianti, D. T. and Hilmi, M. I. (2022). Analisis Gender Peran Perempuan Pesisir pada Ketahanan Keluarga di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 7(1), 52-60.

## **Peraturan**

- Indonesia. (2000). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Jakarta.
- Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Jakarta.
- Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera. Jakarta.
- Indonesia. (2007). Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Revitaliasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera. Jakarta.
- Indonesia. (2018). Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender. Jakarta.
- Indonesia. (2021). Peraturan Walikota Nomor 143 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang. Jakarta.
- Indonesia. (2021). Peraturan Walikota Tangerang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tahun 2019-2023. Jakarta.